BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 Tanggal 24 Desember 1963)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam melanjutkan Revolusi Nasional Indonesia untuk mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, perlu dilaksanakan pembangunan mental-rokhani dalam rangka "nation building" dan "character-building" serta pembangunan materiil dan tata-perekonomian yang bersendikan Ekonomi Terpimpin melalui pelaksanaan Rencana-rencana Pembangunan Semesta terus-menerus;
- b. bahwa untuk maksud itu perlu diadakan suatu badan perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai susunan sedemikian rupa sehingga terjamin dukungan massa terhadap pelaksanaan pembangunan itu;
- c. bahwa badan termaksud harus mempunyai wewenang dan kewibawaan yang cukup besar serta menempati kedudukan yang cukup tinggi dalam lingkungan Badan-badan eksekutif Pusat untuk dapat memperoleh semua keterangan yang diperlukan mengenai pembangunan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. bahwa badan tersebut harus dilengkapi dengan aparaturnya dan tenaga-tenaga yang ahli untuk memungkinkan pelaksanaan tugas badan itu sebaik-baiknya;
- e. bahwa Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Keputusan Presiden No. 322 tahun 1963 tentang susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerja;

Mengingat :

1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I tahun 1960, pasal 10 Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 dan Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1950 dan Ketetapan M.P.R.S. No. IV tahun 1963;
4. Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan);
5. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 534, No. 655 dan No. 656 tahun 1961 dan 232 tahun 1963;

Memperhatikan :

- a. Hasil Karya Panitia Tiga Menteri yang dibentuk pada tanggal 6 Maret 1963;
- b. Saran-saran Pimpinan Dewan Perancang Nasional;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mencabut :

- a. undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144 berhubungan dengan Tambahan Lembaran-Negara No. 1675);
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 79);
- c. dan Peraturan-peraturan lain yang bertahan dengan kedua Peraturan Negara tersebut diatas;

Kedua : Menetapkan :

Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disempurnakan).

Pasal 1

Terhitung mulai berlakunya Penetapan Presiden ini Dewan Perancang Nasional (termasuk Badan Kerja Dewan Perancang Nasional) diintegrasikan kedalam Kabinet Kerja dan dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas.

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah aparatur pembantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara untuk perencanaan, pengawasan dan penilaian pembangunan nasional,
- (2) Sebagai aparatur-pembantu Presiden/Pemimpin besar Revolusi Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu-satunya badan perencanaan pembangunan nasional yang tugasnya dan wewenangnya meliputi segala usaha serta kegiatan perencanaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas :

- a. menyusun Rencana-rencana Pembangunan Nasional jangka panjang, termasuk Rencana-rencana Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat Desa;
 - b. menyusun Rencana-rencana Pembangunan Tahunan;
 - c. mengkoordinir semua usaha persiapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan;
 - d. menilai dan mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 - e. melakukan usaha-usaha penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan;
 - f. menyempurnakan Pola Pembangunan Semesta berencana Tahap Pertama:
- (2) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berwenang minta segala keterangan yang diperlukan dari instansi- instansi Pemerintah yang diwajibkan memberikan keterangan tersebut.

Pasal 4

- (1) Pimpinan Tertinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipegang langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sebagai Ketua.
- (2) Wakil Pimpinan Tertinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipegang oleh Presidium Kabinet Kerja.
- (3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan dan pimpinan harian dijalankan oleh Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Untuk membantu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibentuk Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat MUPPENAS, yang terdiri atas :

- a. Para Menteri/Koordinator Kompartimen Pemerintahan;
- b. Anggota-anggota lain yang diangkat oleh Presiden;

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dalam pasal 4 ayat (3) dibentuk sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang pembantu Menteri.
- (2) Sekretariat tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas Biro-biro sebagai berikut :
 - a. Biro Perencanaan Perpektip;
 - b. Biro Perencanaan Pembinaan Jiwa Revolusi;
 - c. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Keuangan;

- d. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Pembangunan;
 - e. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Distribusi;
 - f. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Dalam Negeri dan Hukum;
 - g. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Pertahanan/ Keamanan;
 - h. Biro Perencanaan Tahunan Kompartimen Kesejahteraan;
 - i. Biro Penilaian;
 - j. Biro Hubungan dan Organisasi INternasional;
 - k. Biro-biro lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan BAPPENAS.
- (3) Untuk membantu Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional diadakan Panitia-panitia tetap, yang terdiri atas ahli-ahli dalam pelbagai bidang pembangunan yang tersusun sebagai berikut :
- a. Panitia Tenaga Pembangunan;
 - b. Panitia Sumber-sumber alam;
 - c. Panitia Sumber-sumber Pembiayaan;
 - d. Panitia Standarisasi dan Normalisasi;
 - e. Panitia Tata-cara dan Peraturan-peraturan;
 - f. Panitia Statistik;
 - g. Panitia-panitia tetap lainnya yang dipandang perlu oleh Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Urusan Perencanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan Daerah dan Masyarakat Desa ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I ditugaskan pada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Di tiap Departemen harus diadakan tugas perencanaan pembangunan dan ditetapkan pada petugasnya.

Pasal 8

Segala sesuatu yang perlu diatur lebih lanjut dan/atau yang belum diatur dalam Penetapan Presiden ini, akan diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 9

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1963.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1963.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA NO. 103 TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG